

## **Konsep *Welfare State* Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

**Agung Susanto, Dika Yudanto, Barransyah Hendri O.R**

[Mr\\_agoenx@yahoo.com](mailto:Mr_agoenx@yahoo.com), [dikayudan@gmail.com](mailto:dikayudan@gmail.com), [hendriramsi80@gmail.com](mailto:hendriramsi80@gmail.com)

Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

### **ABSTRACT**

*Economic development and economic growth are closely related, but they have different meanings and dimensions. High economic growth alone does not always guarantee sustainable and inclusive economic development. Focusing on qualitative aspects of development, such as education, health and income distribution, is also an integral part of achieving balanced and sustainable economic development. Jokowi's administration Volume I was marked by high optimism regarding the economic prospects. The growth target is set at around 7%. However, the condition of external factors which is less conducive and the need for better coordination between ministries/institutions in encouraging investment means that this target has not been achieved. On average, economic growth in the 2014-2018 period was approximately 5 %. The export growth rate of 3.76% was lower than the import growth rate of 4.56%. economic policy in the welfare state concept in President Joko Widodo's government. The type of research that I will use is a research method with a juridical-normative approach. A juridical approach means that this research will include analysis of legal principles, legal structure, level of legal synchronization, historical development of law. The Jokowi government has implemented the welfare state concept through programs and initiatives aimed at increasing economic growth and overcoming inequality, but has not been able to achieve a significant increase in economic growth. Economic development programs in the Jokowi era need to be evaluated from various perspectives, including the level of success in economic growth, community welfare, and the sustainability of Indonesia's development. The government has not been able to create an independent society by continuously receiving goods and services from outside, due to the lack of efforts to increase the independence and maturity of thinking of the community and business actors.*

**Keyword: Welfare state, Jokowi government, economic growth**

### **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya memiliki makna dan dimensi yang berbeda. pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak selalu menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus pada aspek-aspek kualitatif pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan, juga merupakan bagian integral dari pencapaian pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. pemerintahan Jokowi Jilid I ditandai dengan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertumbuhan ditetapkan di kisaran angka 7%. Namun, kondisi faktor eksternal yang kuing kondusif dan butuhnya koordinasi yang lebih baik antar K/L dalam mendorong investasi menyebabkan target tersebut belum

tercapai. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-2018 kurang lebih 5%. Laju pertumbuhan ekspor sebesar 3,76% lebih rendah daripada laju pertumbuhan impor sebesar 4,56%. Kebijakan ekonomi dalam konsep *welfare state* pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini akan mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, struktur hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perkembangan sejarah hukum. Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan konsep *welfare state* melalui program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akan tetapi belum bisa mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, program pembangunan ekonomi di era Jokowi perlu dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia. Pemerintah belum bisa menciptakan masyarakat mandiri dengan terus menerus menerima produk barang maupun jasa dari luar, karena kurangnya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir masyarakat dan para pelaku usaha.

**Kata Kunci: Welfare state, Pemerintah Jokowi, Pertumbuhan ekonomi**

## **A. PENDAHULUAN**

Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya, negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan, ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962:18)<sup>1</sup>

Pembangunan ekonomi suatu negara pada awalnya secara umum merupakan perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal. Kalau masalah kekurangan modal ini bisa teratasi, maka proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang akan lebih cepat mencapai sasaran. Namun istilah *growth* tidak bisa disamakan dengan pengertian *development* (pembangunan)<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan nilai total produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ini mencerminkan perubahan positif dalam kegiatan ekonomi suatu negara, diukur dengan melihat peningkatan produksi barang dan jasa dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya.

---

<sup>1</sup> Hamid, Edy Suandi. *Sistem dan Reformasi Ekonomi Indonesia* diakses tanggal 12 November 2023 dari <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA431403-M1.pdf>

<sup>2</sup> Friedman, *Essays in Positive Economics*, Chicago : University of Chicago Press, 2004, hal. 45

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur kuantitas produksi atau pendapatan, tetapi juga relevan untuk melihat dampaknya pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan tujuan yang diinginkan untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor pertanian ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan tingkat pemerataannya semakin membaik sesuai dengan yang digariskan dalam UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur<sup>3</sup>

Pembangunan yang berkelanjutan mengacu pada suatu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam laporan "Our Common Future" oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 dan sejak itu menjadi salah satu pilar utama pembahasan pembangunan global.

Pembangunan yang berkelanjutan menciptakan kerangka kerja yang mengakui saling ketergantungan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini berusaha mencapai keseimbangan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Analisis pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan dan berhubungan serta saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional<sup>4</sup>

Dalam sebuah negara, pertumbuhan merupakan sebuah ukuran yang cukup penting dan menjadi primadona yang selalu ingin diraih oleh banyak negara di dunia. Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak akan terjadi pertumbuhan ekonomi di suatu negara tanpa

---

<sup>3</sup> Hargo Utomo, "Analisis Pergerakan Saham Sektoral Pasca Pengumuman Investment Grade", Jurnal Manajemen UGM, Vol. 1 (2), 2013, hal. 45-61

<sup>4</sup> Taklim Akbar, *Struktur Perekonomian Indonesia dan Elastisitas Dalam Krisis Finansial 2004-2014*, Jurnal Manajemen UGM, Vol. 2 (1), 2011, hal. 32-37

didahului dengan pembangunan ekonomi. Banyak manfaat yang akan diperoleh suatu negara dengan adanya pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler : usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Namun demikian, di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan. Seperti dinyatakan Haque<sup>5</sup>

*“Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960s and 1970s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty has worsened in many African and Latin American Countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic growth rate, per capita income, and living standards”*

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya memiliki makna dan dimensi yang berbeda. pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak selalu menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Fokus pada aspek-aspek kualitatif pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi pendapatan, juga merupakan bagian integral dari pencapaian pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin jika disertai dengan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat miskin yang mendapatkan akses ke pekerjaan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka, Pendapatan yang meningkat dapat membantu masyarakat miskin mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Indonesia secara statistik tahun 2014 jumlah angka kemiskinan mencapai 28,59 juta orang atau 11,6 persen, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis dimana ini menjadi permasalahan bangsa yang harus diselesaikan secara cepat. Karena salah satu tujuan Indonesia dalam bernegara adalah mewujudkan negara yang sejahtera, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 dimana konsep kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari substansi yang mengatakan kesejahteraan negara mencakup sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada

---

<sup>5</sup> Olson, M., *Power and Prosperity : Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*, New York : Basic Books, 2000.

peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>6</sup>

Istilah "negara kesejahteraan" merujuk pada suatu bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Negara kesejahteraan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari model pemerintahan lainnya. Sistem pendidikan dan layanan kesehatan dalam negara kesejahteraan sering kali gratis atau terjangkau untuk semua warga negara. Hal ini memastikan akses yang setara ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, cenderung memiliki kebijakan yang mendukung redistribusi pendapatan, dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Pajak progresif dan program dukungan sosial merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Negara kesejahteraan dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, dan bentuknya dapat bervariasi di seluruh dunia tergantung pada nilai, budaya, dan sistem politik suatu negara. Meskipun memiliki banyak keuntungan, model negara kesejahteraan juga menghadapi tantangan seperti keberlanjutan finansial dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan negara kesejahteraan sering kali tergantung pada keseimbangan yang baik antara pemberian bantuan sosial dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan "bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat."<sup>7</sup>

Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu peran pemerintah sebagai pemimpin negara sangat dibutuhkan untuk membantu pemerataan kesejahteraan dari setiap kelas yang ada dalam masyarakat. Dalam sebuah negara, kesejahteraan dikaitkan dengan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Masa awal pemerintahan Jokowi Jilid I ditandai dengan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Target pertumbuhan ditetapkan di kisaran angka 7%. Namun, kondisi faktor eksternal yang kuing kondusif dan butuhnya koordinasi yang lebih baik antar K/L dalam mendorong investasi menyebabkan target tersebut belum tercapai. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode 2014-2018 kurang lebih 5%. Laju per-

---

<sup>6</sup> Putra, Marsudi Dedi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. 23(2), 142 di akses 10 November 2023. dari <https://media.neliti.com/media/publications/501075-none-432e7d02.pdf>

<sup>7</sup> Prabu, Kresna. 2018, *Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah*. Diakses pada 10 November 2023, dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>

tumbuhan ekspor sebesar 3,76% lebih rendah daripada laju pertumbuhan impor sebesar 4,56%. Pembentukan PDB dari sektor investasi relatif bertumbuh lambat sehingga perlu didorong tingkat konsumsi masyarakat untuk menjamin Bergeraknya pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup>

*Welfare state* atau yang lazim disebut sebagai negara sejahtera merupakan gagasan ideal bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik membahas tentang analisis kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dalam konsep *welfare state*. Bagaimana kebijakan ekonomi dalam konsep *welfare state* pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini akan mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, struktur hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perkembangan sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Sumber data merujuk pada sumber-sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, sumber data terdiri dari data sekunder, yang merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang terkait dengan pelaksanaan sengeketa pertanahan di pedesaan serta referensi dari buku-buku yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data dimulai dengan pemeriksaan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data yang dihimpun melalui observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Negara kesejahteraan, atau dalam bahasa Inggris disebut "welfare state," merujuk pada suatu bentuk sistem pemerintahan di mana pemerintah memiliki peran aktif dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Model ini menekankan perlindungan sosial, distribusi keadilan, dan pemberdayaan warga negara melalui berbagai program dan kebijakan.

Walaupun karakteristik ini umumnya terdapat dalam negara kesejahteraan, setiap negara dapat mengimplementasikan modelnya sendiri dengan variasi tergantung pada nilai budaya, sejarah, dan kebutuhan spesifik

---

<sup>8</sup> Hendro, (2019) Toto Pranoto : *Optimisme Ekonomi di Periode II Pemerintahan Jokowi* diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://feb.ui.ac.id/2019/10/31/toto-pranoto-optimisme-ekonomi-di-periode-ii-pemerintahan-jokowi/>

negara tersebut. Negara kesejahteraan hadir dalam berbagai bentuk di seluruh dunia, dan modelnya dapat berkembang seiring waktu. Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita-cita yang terkandung didalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, Bab XIV berjudul Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34. Pasal 33 menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 34 mengatakan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Demikian juga Pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. UUD 1945 setelah perubahan (tahun 2002), Bab XIV berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan dasar kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Sementara perubahan Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Selanjutnya dikatakan, baik dalam Pasal 33 maupun Pasal 34, bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam Undang-Undang (Pasal 33 ayat 5 dan Pasal 34 ayat 4).

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan Sembilan agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan NAWACITA. Butir ke-7 dalam NAWACITA adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, yaitu dengan membangun kedaulatan pangan, mewujudkan kedaulatan energy, mewujudkan kedaulatan keuangan, mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/nelayan, mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional<sup>9</sup>.

Pada kampanye Pemilihan Presiden 2014 yang lalu salah satu program utama Jokowi-Jusuf Kalla adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera yang kemudian di kenal sebagai Kartu Sakti Jokowi-JK. Kartu Sakti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pemerintahan Jokowi-JK yang produksi

---

<sup>9</sup> Ded, Muhammad (2015) *Ekonomi Kerakyatan, dari Bung Hatta sampai Jokowi?* Diakses tanggal 15 November 2023 dari <https://sumsel.bps.go.id/news/2015/05/31/10/ekonomi-kerakyatan--dari-bung-hatta-sampai-jokowi-.html>

sekitar 1 juta merupakan hadiah gratis bagi masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin. Hal ini tertuang dalam NawaCita Jokowi-JK.

Jokowi juga menawarkan solusi untuk membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik dengan menggerakkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi serta kepribadian dalam kebudayaan, serta menawarkan 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Dari 31 agenda itu diperas lagi menjadi 9 agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

Dalam Nawacita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah agenda pembangunan nasional yang mencakup aspek-aspek kesejahteraan. Meskipun tidak ada butir Nawacita yang secara eksplisit menyebutkan "kesejahteraan," beberapa butir dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa butir Nawacita yang terkait dengan kesejahteraan:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Perlindungan Sosial:

Meningkatkan perlindungan sosial untuk masyarakat yang rentan melalui program-program bantuan sosial dan jaminan kesehatan nasional. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan agar mereka dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

3. Pemerataan Pembangunan:

Memastikan pembangunan yang merata antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar daerah. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

4. Energi Murah, Aman, dan Berkualitas:

Meningkatkan kapasitas energi nasional dengan memastikan ketersediaan energi yang murah, aman, dan berkualitas. Energi yang murah dan berkualitas diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

5. Revolusi Mental:

Mendorong perubahan sikap, perilaku, dan mentalitas masyarakat menuju nilai-nilai positif, etika kerja, dan semangat gotong royong. Revolusi Mental ini dapat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat.

Meskipun tidak secara khusus menetapkan "kesejahteraan" sebagai butir Nawacita, upaya-upaya di atas mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan sendiri



melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan psikososial. Implementasi kebijakan dan program-program di dalam Nawacita diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Aplikasi kebijakan perekonomian yang bercorak kerakyatan tersebut dalam jangka pendek difokuskan pada tujuan yang mengurangi kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan antar daerah, meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam, serta meningkatnya dukungan infrastruktur.

Berbicara masalah ekonomi rakyat nampaknya tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang UMKM, karena sampai dengan Juni 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa 22,68 juta unit usaha yang ada di Indonesia adalah mereka yang tergolong dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat adalah identik dengan memberdayakan UMKM.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJM maka idealnya sasaran dan prioritas kesejahteraan diusahakan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam skenario menggerakkan ekonomi rakyat, keberpihakan pemerintah sifatnya mutlak. Pemerintah harus menyediakan modal material, intelektual dan institusional. Mengingat UMKM merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia maka untuk tujuan tersebut UMKM dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing dalam pasar global. Tetapi sampai sekarang ini keberpihakan pemerintah dinilai masih belum optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam kategori miskin dan berpengetahuan rendah.

Demikian juga dalam penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini malah mempersempit ruang gerak mereka. Untuk menggerakkan ekonomi rakyat sudah waktunya memutar jarum kompas kearah pemberian kesempatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Komitmen ini tidak saja diperlukan dikalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para, pakar dan praktisi.

Sejalan dengan kebijaksanaan dasar KIB yang tertuang RPJM maka untuk jangka pendek dan jangka menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan berbagai program terobosan, yang memungkinkan percepatan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program penguatan bagi UMKM dan koperasi, dari berbagai aspek usahanya, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.

Tujuan jangka pendek dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Peningkatan pendapatan selanjutnya diprediksikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan dampak akhir akan mengurangi kemiskinan dan perluasan usaha, yang memungkinkan terbukanya peluang kerja baru. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mendorong UMKM dan koperasi agar mampu bersaing dalam pasar global.

Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini koperasi dan UMKM hendaknya diarahkan untuk berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya-saing. Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Program jangka menengah seperti yang akan dijabarkan dalam RPJMN 2010-2014 hendaknya mencerminkan strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lingkup makro, meso, maupun mikro. Pada tataran makro, RPJMN 2010-2014 harus memuat kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan dalam rangka peningkatan daya-saing (*competitiveness*) koperasi dan UMKM. Dalam hal ini tantangan untuk lima tahun ke depan antara lain persaingan usaha yang makin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumberdaya yang diperlukan oleh koperasi dan UMKM.

Pada tataran meso, dokumen rencana jangka menengah harus memuat upaya peningkatan akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif guna meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha mereka. Fokusnya tentu terkait dengan masalah pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perluasan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses terhadap modal dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dan UMKM.

Lalu pada tataran mikro dokumen RPJMN harus memiliki sasaran yang jelas tentang upaya untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan karakteristik dan perilaku pelaku usaha. Rancangan jangka menengah hendaknya menekankan bahwa pelaku usaha koperasi dan UMKM tidak lagi bisa menjalankan bisnis seperti pola yang selama ini diterapkan (*business as usual*). Mereka harus benar-benar dibantu untuk menumbuhkan kewirausahaan, budaya kerja, dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi usaha yang memiliki daya-saing yang tinggi.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah di atas, pemerintah harus berani mengubah paradigma pemberdayaan yang selama ini dipakai. Salah satunya adalah mengubah asumsi klise selama ini

yang memandang koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya remeh, lemah, terbelakang dan pantas dikasihani. Program-program pemberdayaan hendaknya jangan seperti program *charity*, yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, program pemberdayaan hendaknya dirumuskandengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha<sup>10</sup>

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seharusnya melibatkan kombinasi antara pemberian bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bantuan diberikan bersamaan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Ini menciptakan pendekatan holistik yang menggabungkan respons terhadap kebutuhan mendesak dengan upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Kombinasi antara bantuan dan kemandirian masyarakat bertujuan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengatasi tantangan mereka sendiri. Penting untuk memahami konteks lokal, kebutuhan spesifik masyarakat, dan melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

---

<sup>10</sup> Sasongko, Dedy (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)* diakses tanggal 12 November 2020 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat yang pada akhirnya yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, dalam setiap pembangunan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penganganannya adalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontra produktif dan pembangunan ekonomi yaitu dalam konteks yang sesuai dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan sehingga terwujudnya masyarakat mandiri.

Strategi responsive merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri belum pernah dilakukan, maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, satu hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan teknologi sering kali yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri yang berakibat pada penerapan strategi menjadi disfungsional.

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” strategi diatas, maka konsep kombinasi dari etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik karena secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

Dalam perdagangan bebas di era globalisasi ini Indonesia seharusnya tidak hanya jadi penonton atau jadi pelabuhan impor dari negara-negara lain, Indonesia harus mampu bersaing dan menjadi pengekspor besar terhadap barang lokal.

Masyarakat Indonesia diharapkan mampu bersaing dalam perdagangan bebas ini. Dengan adanya perdagangan bebas ini masyarakat harus belajar menciptakan produk-produk unggulan baik barang maupun jasa yang memiliki nilai jual tinggi dan dibutuhkan khalayak ramai. Di era globalisasi ini juga masyarakat harus mulai mencintai produk buaatannya sendiri, yang sampai ini menjadi teka-teki kenapa masyarakat Indonesia lebih bangga mengkonsumsi produk luar negeri daripada produk lokal? Padahal jika masyarakat tahu inilah yang membuat Indonesia kian terpuruk. Indonesia hanya jadi pelabuhan impor

tidak mampu membuat bangga rakyat sendiri untuk menggunakan produk sendiri.

Penerapan perdagangan bebas memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Dampak positif dari perdagangan bebas, diantaranya:

1. Terjadi pertukaran barang, dengan diberlakukannya perdagangan bebas, negara tersebut dapat menikmati produk yang tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas (impor).
2. Kemudian produk-produk dalam negeri dapat dengan mudah meraih popularitas di luar negeri.

Ekspor dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Pendapatan dari ekspor tidak hanya dapat memberikan devisa bagi pemerintah, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Ekspor sering kali melibatkan berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan jasa. Dengan meningkatnya permintaan internasional terhadap produk dan layanan suatu negara, terjadi peningkatan produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pendapatan dari kegiatan ekspor dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja publik, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan publik. Mendorong sektor ekspor dapat memberikan insentif kepada industri untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini dapat mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi produksi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada konsumen.

Bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan manfaat ekspor untuk kesejahteraan rakyat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung, manajemen ekonomi yang baik, dan integrasi yang efektif dengan pasar global. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ekspor Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa inisiatif yang diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan ekspor antara lain Peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi lainnya untuk memperlancar arus barang dan meningkatkan efisiensi logistik. Infrastruktur yang baik dapat membantu menurunkan biaya produksi dan distribusi serta Upaya untuk menyederhanakan prosedur dan regulasi terkait ekspor guna memudahkan pengusaha. Langkah-langkah ini mencakup digitalisasi proses administratif dan perubahan kebijakan yang mendukung kelancaran ekspor. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi sektor ekspor Indonesia dan secara bertahap meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,31% pada 2022. Adapun, pertumbuhan kali ini didorong oleh kinerja ekspor yang luar biasa sepanjang 2022. Kepala Badan Pusat Statistik

(BPS) Margo Yuwono mengungkapkan bahwa pertumbuhan 5,31% merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2013<sup>11</sup>

Devisa akan menguat jika ekspor lebih besar daripada impor. Setiap individu atau perusahaan akan terpacu untuk membuat inovasi dengan kreativitas yang mereka miliki dalam membuat produk baru atau menambahkan nilai untuk mempertinggi daya saing yang dikarenakan kompetisi perdagangan yang bebas. Setiap individu atau perusahaan akan terus meningkatkan mutu dan kualitas produk maupun kinerja perusahaan dengan menerapkan standar-standar dan sertifikasi demi meningkatkan daya saing.

Era globalisasi seharusnya kita jadikan tantangan, dengan adanya globalisasi ini kita menjadi semangat dalam menginovasi produk dan menciptakan produk-produk baru untuk mampu bersaing dalam pasar bebas. Kita juga jadi lebih mempersiapkan SDA yang unggul agar tidak kalah saing dengan WNA yang masuk ke Indonesia. Tidak sampai disitu, globalisasi juga menyadarkan masyarakat bahwa menggunakan produk sendiri sama dengan menyelamatkan negeri. Inilah satu cara yang sederhana namun susah dijalankan, masyarakat seolah malu menggunakan brand ala Indonesia ini, mereka lebih bangga dengan produk asing. Padahal dengan mereka membeli produk asing mereka serta merta ikut mensukseskan perdagangan bebas mereka dan secara tidak langsung membuat Indonesia makin terpuruk. Oleh karena itu Indonesia tidak boleh menjadi penonton. Indonesia harus bisa bersaing di era globalisasi dengan cara kembali kepada individu kita masing-masing untuk mencintai produk lokal.

Melihat era globalisasi tersebut, sebaiknya harus dilakukan antisipasi yang cepat dan menyeluruh. Indonesia perlu melakukan seleksi produk untuk melindungi industri nasional, misalnya pemerintah mencabut pungutan retribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah agar industri lokal menjadi kompetitif.

Pengetatan pemeriksaan barang masuk harus dilakukan karena negara lain juga melakukan hal sama. Walaupun pengetatan pemeriksaan barang impor dalam jangka pendek bisa menahan serbuan produk luar negeri, namun pemerintah masih harus bekerja keras agar industri di Tanah Air bisa bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan proses globalisasi dengan fokus pada peningkatan ekspor Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah-langkah konkret termasuk diversifikasi ekspor, peningkatan kualitas produk, dan penyederhanaan regulasi.

Tetapi secara jangka panjang langkah-langkah tersebut tidak bisa dipertahankan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa ini tidak bisa mengelak dari kebijaksanaan global tersebut. Masyarakat industri harus

---

<sup>11</sup> Sopiah, Anisa (2023) *RI Tumbuh 5,31% di 2022, Rekor PDB Tertinggi Era Jokowi* diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230206121326-4-411312/ri-tumbuh-531-di-2022-rekor-pdb-tertinggi-era-jokowi>

berjuang dengan keras untuk memenangkan persaingan global yang semakin mengancam. Dibutuhkan kejelian dan kreatifitas untuk dapat menembus persaingan ketat tersebut.

Kita harus juga menciptakan produk baru yang mampu menggantikan produk-produk impor atau dengan kata lain kita bisa menggunakan sistem substitusi impor. Dengan begitu kita pasti bisa menjadi negara yang anti impor. Dengan meminimalkan impor devisa negara tidak akan berkurang namun untuk menambahnya kita harus melakukan ekspor oleh sebab itu kita harus menciptakan produk-produk yang unggul.

Dalam menghadapi perdagangan bebas yang sudah di depan mata, nampaknya Indonesia masih belum optimal mempersiapkan itu semua.

Dalam menghadapi perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area) AFTA atau (ASEAN Economic Community) AEC Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukkan ketidaksiapan, diantaranya adalah dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik.

Kepastian hukum merupakan hal sangat penting dalam mendukung iklim investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Faktor lain yang amat penting adalah lembaga-lembaga yang seharusnya ikut memperlancar perdagangan dan dunia usaha ternyata malah sering diindikasikan KKN. Akibat masih meluasnya KKN dan berbagai pungutan yang dilakukan unsur pemerintah di semua lapisan, harga produk yang dilempar ke pasar akan terpengaruhi. Otonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan mendorong ekonomi lokal ternyata dipakai untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari dunia usaha tanpa menghiraukan implikasinya. Otonomi malah menampilkan sisi buruknya yang bisa mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dunia.

Persoalan lain yang harus dihadapi adalah kenyataan bahwa perbatasan Indonesia sangat luas, baik berupa lautan maupun daratan, yang sangat sulit diawasi. Akibatnya, terjadi banjir barang selundupan yang melemahkan daya

saing industri nasional. Miliaran dolar amblas setiap tahun akibat ketidakmampuan menjaga perbatasan dengan baik. Menurut taksiran kemampuan TNI-AL, sekitar 40 persen dari seharusnya digunakan untuk mengamankan lautan akibat kekuarangan dana dan sarana yang lain. Kendala utama bagi masyarakat Indonesia adalah mengubah pola pikir, baik di kalangan pejabat, politisi, pengusaha, maupun tenaga kerja. Mengubah pola pikir ini sangat penting bagi keberhasilan Indonesia memasuki perdagangan bebas.

Selama Jokowi berkuasa hingga dua periode pada 2014-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi tercatat 4,26% per tahun. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan torehan laju pertumbuhan ekonomi RI selama SBY menjabat pada periode 2004-2013 yang sebesar 5,9% per tahun. Kendati misalnya pertumbuhan ekonomi RI tahun ini bisa tercapai 5% sesuai prediksi terbaru IMF, Jokowi juga belum akan mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi era SBY. Memasukkan asumsi 5% pada 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi RI selama 2014-2023 hanya akan tercatat 4,33%. Jokowi baru bisa menyamai capaian pertumbuhan ekonomi era SBY bila pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa menembus 20%, sesuatu yang hil mustahal di tengah perlambatan perekonomian global buntut dari krisis geopolitik dan disrupsi rantai pasokan global pasca pandemi pecah. Pada kuartal 1 lalu, Indonesia baru mencetak pertumbuhan 5,03%.<sup>12</sup>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Walaupun pemerintahan Jokowi telah melaksanakan konsep *welfare state* melalui program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi ketidaksetaraan akan tetapi belum bisa mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, selama 2014-2023 peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya tercatat rata-rata 4,33% dengan rekor tertinggi tercatat 5,31% di tahun 2022.
- b. Pelaksanaan program pembangunan ekonomi di era Jokowi perlu dievaluasi dari berbagai perspektif, termasuk tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.
- c. Pemerintah belum bisa menciptakan masyarakat mandiri dengan terus menerus menerima produk barang maupun jasa dari luar, karena kurangnya upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir masyarakat dan para pelaku usaha.

### **2. Saran**

- a. Untuk mengoptimalkan konsep *welfare state*, pemerintah Indonesia harus lebih giat lagi dalam mengimplementasikan program paket kebijakan yang sudah dibuat serta dibarengi dengan pembangunan kultur

---

<sup>12</sup> Khoiriyah, Ruisa. (2023). *Jokowi VS SBY, Rapor Ekonomi Siapa Lebih Bagus?* Diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/6547/jokowi-vs-sby-rapor-ekonomi-siapa-lebih-bagus>



- dan budaya mandiri dalam diri masyarakat yang pada akhirnya yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
- b. Penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi dan memudahkan usaha, terutama bagi pelaku UMKM.
  - c. Pemerintah perlu memberikan pelatihan terhadap UMKM di Indonesia untuk menciptakan produk-produk baru untuk bisa menjadi pengganti barang dan jasa yang biasa diimpor agar terciptanya negara kesejahteraan untuk mampu bersaing dalam pasar global dari proses produksi sampai dengan pemasarannya.
  - d. Meningkatkan kelembagaan hukum untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Friedman, *Essays in Positive Economics*, Chicago : University of Chicago Press, 2004.
- Hargo Utomo, "Analisis Pergerakan Saham Sektoral Pasca Pengumuman *Investment Grade*", *Jurnal Manajemen UGM*, Vol. 1 (2), 2013.
- Olson, M., *Power and Prosperity : Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships*, New York : Basic Books, 2000.
- Taklim Akbar, *Struktur Perekonomian Indonesia dan Elastisitas Dalam Krisis Finansial 2004-2014*, *Jurnal Manajemen UGM*, 2011.
- Putra, Marsudi Dedi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. 23(2), 142 di akses 10 November 2023. dari <https://media.neliti.com/media/publications/501075-none-432e7d02.pdf>
- Prabu, Kresna. 2018, *Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah*. Diakses pada 10 November 2023, dari <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>
- Hendro, (2019) Toto Pranoto : *Optimisme Ekonomi di Periode II Pemerintahan Jokowi* diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://feb.ui.ac.id/2019/10/31/toto-pranoto-optimisme-ekonomi-di-periode-ii-pemerintahan-jokowi/>
- Ded, Muhammad (2015) *Ekonomi Kerakyatan, dari Bung Hatta sampai Jokowi?* Diakses tanggal 15 November 2023 dari <https://sumsel.bps.go.id/news/2015/05/31/10/ekonomi-kerakyatan--dari-bung-hatta-sampai-jokowi-.html>
- Sasongko, Dedy (2020). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)* diakses tanggal 12 November 2020 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- Asmara, Chandra Gian. (2020). *Apa Saja Langkah Jokowi Selamatkan RI dari Jurang Krisis?* Diakses pada tanggal 10 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200713093610-4-172097/apa-saja-langkah-jokowi-selamatkan-ri-dari-jurang-krisis.>

- Sopiah, Anisa (2023) *RI Tumbuh 5,31% di 2022, Rekor PDB Tertinggi Era Jokowi* diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230206121326-4-411312/ri-tumbuh-531-di-2022-rekor-pdb-tertinggi-era-jokowi>
- Khoiriyah, Ruisa. (2023). *Jokowi VS SBY, Rapor Ekonomi Siapa Lebih Bagus?* Diakses tanggal 13 November 2023 dari <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/6547/jokowi-vs-sby-rapor-ekonomi-siapa-lebih-bagus>